

**LAPORAN BULANAN BPP PROVINSI PAPUA
TENGAH BULAN JUNI 2025**



BPP

BADAN PENGARAH PAPUA

**WILAYAH BPP PAPUA TENGAH
POKJA PAPUA SEHAT, CERDAS, PRODUKTIF DAN
POLHUKAM TAHUN 2025**





**PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP)
SEKRETARIAT BP3OKP PROVINSI PAPUA TENGAH**

JALAN MERDEKA NO 46 NABIRE
Kontak : (0984) 22350; Email: bpp.papteng@gmail.com
Website : <https://badanpengarahpapua.go.id/>

Nomor : 06/VI/2025/BPP.PT
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kegiatan BPP
Bulan Juni 2025

Nabire, 26 Juni 2025
Kepada
Yth. **Kanwil DJPB
Provinsi Papua**

di
Jayapura.

Surat Pengantar

1. Berdasarkan :
 - a) Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
 - b) Peraturan Ketua BP3OKP No.1 Tahun 2023 tentang OTK BP3OKP sesuai Pasal 2 dan 3 Tugas dan Fungsi BP3OKP.
2. Laporan Bulanan BP3OKP Papua Tengah Bulan Mei 2025 Demikian untuk menjadi Maklum.

**BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA TENGAH
(BP3OKP)**



IRJEN POL (P) DRS. PIETRUS WAINE, S.H., M.HUM

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
A. KEGIATAN STRATEGIS BPP PAPUA TENGAH (ANGGOTA DAN POKJA).....	5
B. CAPAIAN PEMBANGUNAN PROYEK.....	5
C. REKOMENDASI ANGGOTA BPP TERKAIT PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN.....	6
D. KESIMPULAN DAN PENUTUP.....	6

Ringkasan Eksekutif

BP3OKP/BPP adalah Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus dan Badan Khusus yang berkedudukan langsung dibawah Wakil Presiden. Sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPP dalam melaksanakan SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi) maka terdapat beberapa Program Kerja yang telah dilaksanakan oleh Anggota BPP Papua Tengah Bersama Dengan Pokja di Bulan Juni ini diantaranya adalah :

1. Anggota BPP Papua Tengah
 - Kegiatan mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila (02 Juni 2025)
 - Rapat Zoom, pembahasan progres kinerja BPP TW 1 2025 dan Annual Report BPP Tahun 2024. (5 Juni 2025)
 - Melaksanakan tugas menghadiri undangan Rapat Koordinasi interoperabilitas sistem informasi pengelolaan dana otonomi khusus bersama direktorat jenderal perimbangan keuangan yang dilaksanakan di bekasi, jawa barat. (11 s.d 12 Juni 2025)
 - 6 anggota BPP se-Tanah Papua Melakukan Rapat dengan Menteri Hak Asasi Manusia 13 Juni 2025, terkait 9 point hasil kegiatan rapat bersama 6 gubernur se-tanah papua 17 April 2025.
 - 6 anggota BPP se-Tanah Papua Melakukan Rapat dengan Wamendagri 24 juni 2025, terkait 9 point hasil kegiatan rapat bersama 6 gubernur se-tanah papua 17 April 2025.
2. Pokja Papua Produktif
 - Rapat Koordinasi rancangan pembelajaran wajib belajar 13 tahun, Tahun 2025 (28 mei s.d 2 Juni 2025)
 - Menghadiri undangan pemerintah provinsi dalam rangka validasi rencana aksi (SPM) untuk periode 2025-2029. (04 Juni 2025)
 - Rapat Zoom, pembahasan progres kinerja BPP TW 1 2025 dan Annual Report BPP Tahun 2024. (5 Juni 2025)
 - Rapat SHEK Bersama Asosiasi Pengusaha Papua Tengah dan Instansi Terkait. Tanggal 10 Juni 2025
 - menghadiri kegiatan forum konsultasi publik (FKP) dan pemberian penghargaan KPPN Nabire tahun 2025 secara daring/zoom 25 Juni 2025
3. Pokja Papua sehat
 - Rapat SHEK kolaborasi penanggulangan HIV/AIDS di Papua Tengah. 17 Juni 2025
 - menghadiri kegiatan forum konsultasi publik (FKP) dan pemberian penghargaan KPPN Nabire tahun 2025 secara daring/zoom 25 Juni 2025
4. Pokja Papua Cerdas
5. Mewakili anggota BPP menghadiri kegiatan forum konsultasi publik (FKP) dan pemberian penghargaan KPPN Nabire tahun 2025 secara daring/zoom 25 Juni 2025
6. Pokja Polhukam
7. Rapat Zoom, pembahasan progres kinerja BPP TW 1 2025 dan Annual Report BPP Tahun 2024. (5 Juni 2025)

Program-Program kerja yang telah dijalankan Oleh BPP bertujuan untuk tercapainya visi-misi BPP sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2021 “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil dan Sejahtera” dengan salah satu lainnya. Demikianlah beberapa Program Kerja BPP Provinsi Papua Tengah di Bulan Juni yang dapat kami sampaikan.

A. KEGIATAN STRATEGIS BPP PAPUA TENGAH (ANGGOTA DAN POKJA)

Adapun Kegiatan anggota BPP Provinsi Papua Tengah bersama dengan Pokja selama bulan Juni 2025 yaitu antara lain sebagai berikut :

No	KEGIATAN PRIORITAS BPP PAPUA TENGAH (ANGGOTA DAN POKJA)	MISI RIPP
01	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 6 anggota BPP se-Tanah Papua Melakukan Rapat dengan Menteri Hak Asasi Manusia 13 Juni 2025, terkait 9 point hasil kegiatan rapat bersama 6 gubernur se-tanah papua 17 April 2025. ➤ 6 anggota BPP se-Tanah Papua Melakukan Rapat dengan Wamendagri 24 juni 2025, terkait 9 point hasil kegiatan rapat bersama 6 gubernur se-tanah papua 17 April 2025. 	Anggota BPP PPT
02	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Koordinasi finalisasi data usulan Guru P3K Afirmasi dari 8 Kabupaten ke Menteri Pendidikan melalui Dirjen GTK ➤ Koordinasi dan fasilitasi Revitalisasi Supras PAUD/TK.SD.SMP.SMA.SMK 8 kabupaten Tahun Anggaran 2025 dengan Kementerian Pendidikan melalui Dirjen PAUDDIKDAAMENA 	Papua Cerdas
03	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapat SHEK Bersama Assosiasi Pengusaha Papua Tengah dan Instansi Terkait. Tanggal 10 Juni 2025 	Papua Produktif
04	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapat Zoom, pembahasan progres kinerja BPP TW 1 2025 dan Annual Report BPP Tahun 2024. (5 Juni 2025) 	Papua Polhukam
05	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapat SHEK kolaborasi penanggulangan HIV/AIDS di Papua Tengah. 17 Juni 2025 	Papua Sehat

1. Anggota BPP Provinsi Papua Tengah

- Kegiatan mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila (02 Juni 2025)



Pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, yang dibacakan oleh Gubernur Papua Tengah mengatakan Hari Lahir Pancasila Yang jatuh Pada 1 Juni, merupakan Ideologi Negara yang mempersatukan keberagaman Indonesia. Dengan semangat gotong - royong, keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia, Pancasila menjadi landasan pembangunan bangsa.



Ia juga menjelaskan Pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045, termasuk didalamnya memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Upacara Hari Lahir Pancasila di Provinsi Papua Tengah berlangsung Khidmat dan penuh semangat, sejumlah Peserta Upacara pun terlihat mengenakan pakaian Adat dari beberapa Daerah.

Turut hadir Forkopimda Papua Tengah, Pj. Sekda Papua Tengah, Ketua DPRP, DPRD, MRP, Para Tokoh, Para ASN, TNI/POLRI, Pimpinan OPD, serta Organisasi Masyarakat setempat.

- Rapat Zoom, pembahasan progres kinerja BPP TW 1 2025 dan Annual Report BPP Tahun 2024. (kamis, 5 Juni 2025)



(Anggota BPP Papua Tengah)

seluruh provinis dan kab/kota belum ada yang melaporkan dana otsus perlu adanya prassing dari kanwil, sebagai pedoman agar dapat meminta laporan otsus keseluruhan pemda



(Kanwil DJPB Jayapura)

laporan dana otsus 2024 sebagai laporan tahunan dari BPP apabila tidak mengirimkan laporan otsus maka dana otsus 2025 tidak dapat disalurkan



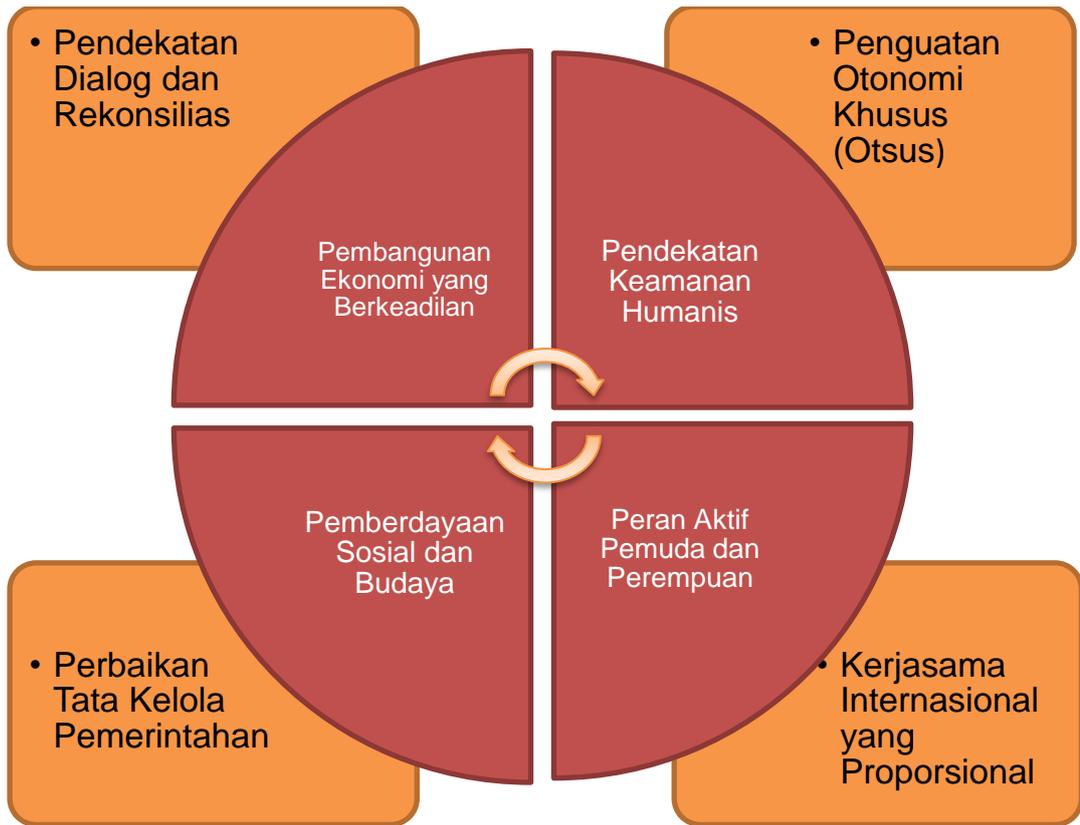
- Melaksanakan tugas menghadiri undangan Rapat Koordinasi interoperabilitas sistem informasi pengelolaan dana otonomi khusus bersama direktorat jenderal perimbangan keuangan yang dilaksanakan di bekasi, jawa barat. (11 s.d 12 Juni 2025)



- 6 anggota BPP se-Tanah Papua Melakukan Rapat dengan Menteri Hak Asasi Manusia 13 Juni 2025, terkait 9 point hasil kegiatan rapat bersama 6 gubernur se-tanah papua 17 April 2025.



Terdapat 8 Point yang menjadi kesimpulan dialog pengelolaan dana otonomi khusus yaitu sebagai berikut :



- 6 anggota BPP se-Tanah Papua Melakukan Rapat dengan Wamendagri 24 juni 2025, terkait 9 point hasil kegiatan rapat bersama 6 gubernur se-tanah papua 17 April 2025.

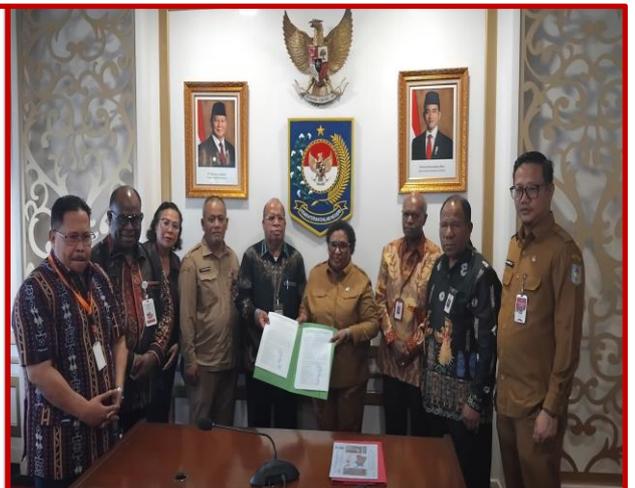
KESIMPULAN RAPAT/PERTEMUAN WAKIL MENTERI DALAM NEGERI DENGAN ANGGOTA BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP)

SELASA, 24 JUNI 2025

Pada hari ini, tanggal 24 Juni 2025 bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Wakil Menteri Dalam Negeri bersama dengan 6 Anggota BP3OKP dalam rangka pembahasan isu-isu strategis perkembangan implementasi khusus otonomi papua dengan hasil sebagai berikut:

1. Terkait dengan tata kelola dana otsus, telah dilakukan interoperabilitas antara SIPD (Kemendagri), SIKD (Kemenkeu), dan SIPPP (Bappenas) dalam rangka optimalisasi percepatan perbaikan tata kelola dana otsus. Ini juga sejalan dengan rekomendasi dari KPK. Untuk selanjutnya, Kemendagri akan melakukan pemberian pendampingan dan konsultasi kepada pemerintah daerah.
2. Dalam rangka penguatan tugas dan fungsi BP3OKP, Kemendagri akan memberikan pendampingan dan supervisi secara berkelanjutan.
3. Dalam rangka membangun kesepahaman bersama terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan implementasi Asta Cita di tanah Papua perlu dilaksanakan forum koordinasi bersama yang melibatkan pemerintah pusat, BP3OKP, gubernur, bupati/wali kota, MRP, DPRD/DPRK, dan pemangku kepentingan lainnya. Agenda dimaksud disarankan dilaksanakan di wilayah Papua dan akan dilaporkan lebih lanjut kepada Bapak Wakil Presiden dan Bapak Mendagri.
4. Kemendagri sebagai anggota BP3OKP akan berkoordinasi dengan Sekretaris Eksekutif BP3OKP Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI untuk meminta waktu audiensi bersama Bapak Wakil Presiden selaku Ketua BP3OKP.

Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M. (Wakil Menteri Dalam Negeri)	
Albert Yoku, S.Ag. (BP3OKP Perwakilan Prov. Papua)	
Irene Manubuy S.H., M.Kn. (BP3OKP Perwakilan Prov. Papua Barat)	
Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si. (BP3OKP Perwakilan Prov. Papua Selatan)	
Drs. Petrus Waine, S.H., M.H. (BP3OKP Perwakilan Prov. Papua Tengah)	
Hantor Matuan, S.IP. (BP3OKP Perwakilan Prov. Papua Pegunungan)	
Drs. Otto Ihalauw, M.A. (BP3OKP Perwakilan Prov. Papua Barat Daya)	



2. Pokja Papua Produktif

- Rapat Koordinasi rancangan pembelajaran wajib belajar 13 tahun, tahun 2025. (28 Mei s.d 2 Juni 2025)



- Pemaparan Kebijakan Nasional Wajib Belajar 13 Tahun • Diskusi Panel:
- Tantangan dan Peluang Implementasi di Wilayah 3T
- Workshop Penyusunan Rancangan Pembelajaran Terpadu
- Simulasi Integrasi Kurikulum untuk Jenjang SD hingga SMA
- Sesi kelompok: Penyesuaian muatan lokal dan konteks Papua
- Presentasi hasil rancangan dari masing-masing kelompok
- Diskusi dan masukan dari tim pakar dan narasumber
- Penyusunan rencana tindak lanjut oleh tiap daerah
- Penutupan kegiatan dan pembacaan komitmen bersama

“Rekomendasi”

- Perlu penguatan kapasitas guru dan kepala sekolah secara berkala.
- Pengembangan modul kontekstual berbasis kearifan lokal Papua.
- Dukungan pendanaan khusus dari pusat untuk mempercepat kesiapan satuan pendidikan

- Menghadiri undangan pemerintah provinsi dalam rangka validasi rencana aksi (SPM) untuk periode 2025-2029. (04 Juni 2025)



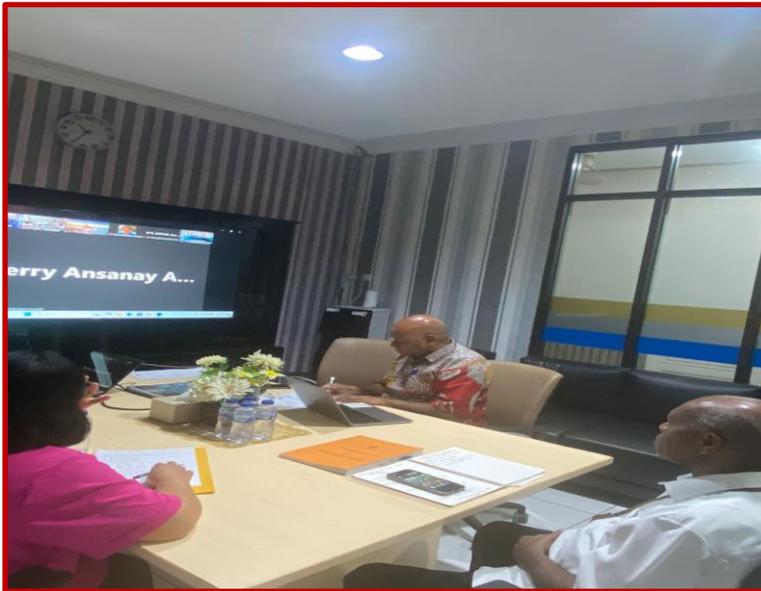
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM.



Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan kegiatan Finalisasi Rencana Aksi (Renaksi) Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk periode 2025-2029, bertempat di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah

Senin, 2 Juni 2025.

- Rapat Zoom, pembahasan progres kinerja BPP TW 1 2025 dan Annual Report BPP Tahun 2024. (5 Juni 2025)



Papua produktif harus melakukan dukungan fiskal dan capaian output, capaian pembangunan, progres kerja dan kondisi isu dan tantangan

- Rapat SHEK Bersama Asosiasi Pengusaha Papua Tengah dan Instansi Terkait. Tanggal 10 Juni 2025

Temuan Utama

- Perlunya regulasi afirmatif untuk perlindungan pelaku usaha OAP
- Kebutuhan pelatihan manajemen usaha dan akses pasar digital
- Kurangnya akses terhadap pembiayaan dan permodalan usaha
- Pentingnya kolaborasi antara asosiasi pelaku usaha dan instansi teknis dalam pendampingan usaha Kecil dan menengah
- Pertemuan terus berkelanjutan

Rencana Tindak Lanjut

- Pembentukan tim kerja sinergi antara BOP3OKP dan asosiasi pelaku usaha
- Penyusunan program pelatihan dan pendampingan berbasis kluster (pertanian, perdagangan, kerajinan)
- Integrasi data pelaku usaha dalam sistem perencanaan daerah
- Advokasi penggunaan Dana Otsus untuk penguatan



- Menghadiri undangan Rapat paripurna penetapan Perdasi dan Perdusus provinsi Papua Tengah mewakili Anggota BPP Papua Tengah. 16 Juni 2025



- menghadiri kegiatan forum konsultasi publik (FKP) dan pemberian penghargaan KPPN Nabire tahun 2025 secara daring/zoom 25 Juni 2025



3. Pokja Papua Sehat

- Pertemuan dengan KPA 13 Juni 2025
 - Pertemuan dengan kabid P2P terkait data HIV AIDS, Kemudian lokus pengidap HIV tertinggi di kabupaten Nabire menjadi Acuan, termasuk penggaran khusus HIV AIDS, kerja sama KPA



- Rapat SHEK kolaborasi penanggulangan HIV/AIDS di Papua Tengah. 17 Juni 2025



• 2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan dan pencegahan HIV/AIDS
- Memperkuat komitmen dan mendorong peningkatan penganggaran penanganan HIV/AIDS yang jelas oleh pemerintah.
- Memperjelas fokus dan lokasi khusus yang menjadi sumber penularan/seks bebas bagi orang dengan HIV/AIDS
- Memperluas cakupan layanan tes HIV/AIDS
- Mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS

• Hasil yang Dicapai

- Menemukan kasu baru
- Menekan laju penambahan jumlah kasus HIV/AIDS
- Meningkatnya pemahaman tentang bahaya penularan penyakit HIV/AIDS
- Kesadaran bagi setiap orang memeriksakan diri terhadap penyakit HIV/AIDS
- Kesadaran ODHA untuk mau minum obat setia dengan ARV sepanjang hidup
- Menghilang Stigma buruk terhadap penderita HIV/AIDS dan menghilang rasa beban mental untuk menghadapi kehidupan ditengah komunitas

4. Politik Hukum dan keamanan

- Rapat Zoom, pembahasan progres kinerja BPP TW 1 2025 dan Annual Report BPP Tahun 2024. (5 Juni 2025)



Politik, hukum keamanan harus melakukan dukungan fiskal dan capaian output, capaian pembangunan, progres kerja dan kondisi isu dan tantangan

- menghadiri kegiatan forum konsultasi publik (FKP) dan pemberian penghargaan KPPN Nabire tahun 2025 secara daring/zoom 25 Juni 2025



- Rapat pembahasan Progres Kinerja kelompok kerja BPP (mewakili Anggota BPP Perwakilan Papua Tengah)



5. Pokja Papua Cerdas

- Koordinasi dan fasilitasi Revitalisasi Supras PAUD/TK.SD.SMP.SMA.SMK 8 kabupaten Tahun Anggaran 2025 dengan Kementerian Pendidikan melalui Dirjen PAUDDIKDAAMENA
- Koordinasi finalisasi data usulan Guru P3K Afirmasi dari 8 Kabupaten ke Menteri Pendidikan melalui Dirjen GTK



- Rapat pembahasan Progres Kinerja kelompok kerja BPP (mewakili Anggota BPP Perwakilan Papua Tengah)



Demikian Rangkuman hasil yang di capai dari kegiatan BP3OKP di Bulan Juni 2025 sebagai berikut.

A. CAPAIAN PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS

Belum terdapat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Proyek Strategis Daerah (PSD).

**B. REKOMENDASI ANGGOTA BPP TERKAIT
PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PAPUA WILAYAH PAPUA TENGAH**

Berdasarkan hasil evaluasi Anggota dan Pokja BPP Papua Tengah selama pelaksanaan Kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi selama bulan Juni 2025, memberikan Rekomendasi sebagai Upaya optimalisasi pelayanan percepatan Pembangunan Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Ada dua rekomendasi yaitu :

1. Sesuai Tugas dan Fungsi SHEK BPP

Adapun usulan yang disampaikan anggota BPP agar tercapainya Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Tengah antara lain:

- a Banyak program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi kelompok kerja (papua sehat,papua cerdas,papua produktif dan papua polhukam) namun tidak dibarengin dengan dukungan biaya;
- b Dari kesimpulan rapat bersama Menteri Ham dan wemendagri
- c Percepatan penuntasan kemiskinan dan pengangguran ekstrim di Provinsi Papua Tengah, maka program SMK Terintegrasi Balakai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Sangkar Kegiatan Belajar (SKB)/PKBM menjadi Prioritas dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga dan bersa
- d PP 106 tentang kewenangan pengelolaan pendidikan menengah sebagaimana diatur dalam lampiran PP 106 agar dapat direvisi dan pengelolaan kewenangan dialihkan ke Provinsi, karena Kabupaten mengalami devisit anggaran ;
- e Pembagian presentasi anggaran OTSUS sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 2021, dapat direview untuk tidak berpatokan pada presentasi, namun diberi keleluasaan kepada Pemda untuk dapat menyesuaikan kondisi wilayah serta kebutuhan prioritas dari masing-masing Kabupaten/kota;

- f Berdasarkan huruf c.d dan e diatas, jika tidak mendapat dukungan penyelesaian maka akan berdampak pada masalah kejahatan konvensional/tradisional seperti pemalangan, pembunuhan, perampokan, pembakaran, pengrusakan kantor-kantor public/pemerintah dan swasta, pencurian, narkoba, dan lain sebagainya.

2. Tata Kelola Sekretaritan BPP

BP3OKP sebagai lembaga Nonlembaga Negara yang melaksanakan Tugas dan Fungsi SHEK mengalami kendala dalam tata Kelola Keuangan sehingga BP3OKP terkesan tidak terlihat kinerja.

Berikut beberapa rekomendasi hasil Evaluasi Anggota dan Pokja BPP Papua Tengah sebagai berikut :

- a Belum terpenuhinya Hak Fasilitas berupa kendaraan, perumahan, asuransi kerja, THR hari-hari besar bagi Anggota dan Kelompok Kerja dan sekretariat BPP Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Perpres No 121 tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (BP3OKP)
- b Dalam Buku Saku tentang Dukungan Administratif dari Sekretariat Badan Pengarah Papua belum menguraikan Harga Satuan Perjalanan Dinas sesuai dengan standar biaya tingkat kemahalan di wilayah Papua Tengah sehingga sangat menghambat pelaksanaan percepatan program dan kegiatan BPP Papua Tengah;
- c Belum tersedianya dana Cadangan/Kontigensi (keadaan/situasi darurat yang segera ditangani/direspon oleh BPP Papua Tengah, sehingga kasus pembunuhan, kasus perkelahian antar suku, pemalangan jalan, korban akibat kecelakaan, bencana alam mengalami keterlambatan dalam penanganannya;
- d Banyak kegiatan BPP Papua Tengah yang semestinya harus diketahui oleh Masyarakat publik, namun selama ini tidak terpublikasi sama sekali dikarenakan belum tersedianya biaya Publikasi/Media di KPPN Nabire;
- e Kedudukan BPP Papua di masing-masing Provinsi, sesuai pasal 68.a UU No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, agar

disamakan dengan Badan-Badan Khusus lain yaitu MRPT,DPRPPT,DPRK,BP3OKP dan DPD RI dalam kedudukan dan penganggaran.

C. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan Kegiatan BPP Papua Tengah di bulan Juni 2025, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan SHEK diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan dengan semua pihak terutama Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah, MRPPT,DPRPT, DPRPPT, dan Para Bupati serta mitra pembangunan lainnya.

Demikian Laporan Bulanan yang dapat Kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.